

**PENGARUH ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KAB/KOTA NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2023**

Debri Adriana Ndun¹

Ida Ayu Gde Dyastari Saskara²

Made Heny Urmila Dewi³

^{1,2,3}*FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia*

ABSTRAK

Pembangunan manusia merupakan indikator penting kemajuan suatu negara yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015–2023. Penelitian menggunakan data panel dengan 198 sampel dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan anggaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial, pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan belum efektifnya alokasi anggaran sektor tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Anggaran Belanja Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia.*

Klasifikasi JEL: H51, H52, H53, O15, C23

ABSTRACT

Human development is a key indicator of a country's progress, measured by the Human Development Index (HDI). This study aims to analyze the impact of government expenditure in the education, health, and social protection sectors on the HDI of regencies/cities in East Nusa Tenggara Province during 2015–2023. The study employs panel data with 198 observations and applies panel data regression analysis. The results show that government expenditure simultaneously has a significant effect on HDI. Partially, expenditure on education and health has a positive and significant effect on HDI, while expenditure on social protection has a negative and significant effect, indicating that social protection budget allocation has not been effective in improving community welfare.

Keywords: *Government Expenditure, Education, Health, Social Protection, Human*

Development Index.

JEL Classification: H51, H52, H53, O15, C23.

PENDAHULUAN

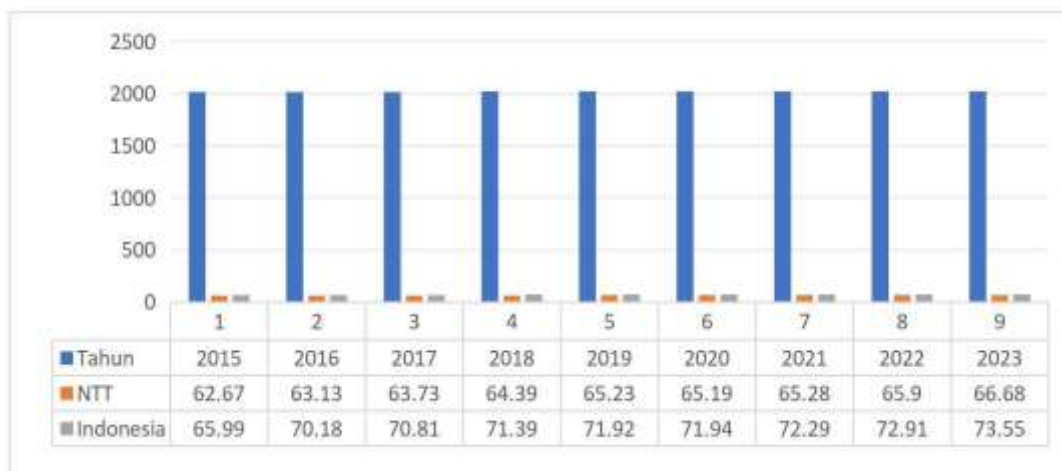
Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensi, melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga negara, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menanggulangi kemiskinan. Aspek "multidimensi" ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari segi ekonomi, tetapi juga dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia berperan sebagai alat ukur yang komprehensif untuk menilai kualitas kehidupan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 74,39 poin dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia 66,68 pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional Indonesia pada tahun yang sama (74,39), yang menunjukkan adanya disparitas antara Nusa Tenggara Timur dan rata-rata Nasional dengan selisih 7,71%.

Gambar 1: Presentase Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-

2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur meningkat dari 62,67 pada 2015 menjadi 66,68 pada 2023, mencerminkan perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Namun, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional yang naik dari 65,99 menjadi 73,55, dengan kesenjangan melebar dari 3,32 menjadi 6,87 poin. Hal ini menunjukkan laju peningkatan IPM NTT lebih lambat, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses layanan dasar.

Peningkatan nilai indeks pembangunan manusia di suatu daerah bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan keuangan yang mendukung pembangunan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota (Simbolon, 2021). Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh suatu daerah dalam mengelola wilayahnya adalah melalui otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa tugas pemerintah daerah mencakup pelaksanaan otonomi yang seluas- luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Menurut Mankiw (2006), pengembangan sumber daya manusia dapat dicapai melalui peningkatan kualitas modal manusia, yang meliputi aspek pendidikan dan kesehatan. APBN menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai program dan kegiatan

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan bahwa belanja negara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara menjadi salah satu alat kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional.

Selama periode 2015–2023, alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fluktuasi. Anggaran pendidikan meningkat signifikan dari 1,103 triliun rupiah pada 2015 menjadi puncaknya 3,158 triliun rupiah pada 2020, kemudian menurun hingga 2,018 triliun rupiah pada 2023. Anggaran kesehatan juga naik dari 278 miliar rupiah pada 2015 menjadi 481 miliar rupiah pada 2023, menandakan peningkatan perhatian terhadap sektor kesehatan. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial berfluktuasi antara 42 hingga 62 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi pada 2022. Dalam banyak penelitian sebelumnya anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun terdapat juga penelitian dengan hasil temuan, anggaran belanja pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

Atas dasar kondisi tersebut diatas kiranya peneliti merasa perlu membuktikan apakah benar anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dapat mempengaruhi secara parsial maupun simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada tahun 2015-2023 dengan mempertimbangkan dampaknya belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun kebijakan pengalokasian anggaran belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Modal Manusia

Teori modal manusia yang dipopulerkan oleh Gary Becker dalam bukunya "Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education" (1964), menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi dalam diri individu yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan memiliki peran penting sebagai salah satu komponen utama selain pendidikan dan standar hidup layak. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk beraktivitas secara optimal, meningkatkan produktivitas kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat pencapaian IPM melalui peningkatan angka harapan hidup, daya saing tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro (2015; 365-366), konsep modal manusia dapat dipahami sebagai investasi yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan tingkat konsumsi di masa depan. Investasi ini mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin banyak pelatihan yang diikuti, semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Di sisi lain, kesehatan juga berperan penting dalam pendidikan. Pendidikan yang tinggi tidak akan efektif tanpa kondisi tubuh yang sehat, dan sebaliknya, pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang melibatkan tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Skor IPM berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang tinggi. Berdasarkan UNDP, IPM diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Very High HDI* : Ketika $IPM \geq 0.800$
- b. *High HDI* : Ketika Nilai IPM 0.700-0.800
- c. *Medium High* : Ketika nilai IPM 0.550-0.700
- d. *Low HDI* : Ketika nilai IPM ≤ 0.550

Konsep Pengeluaran Pemerintah

Sadono (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas modal manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi belanja daerah diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

a) Anggaran Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan besaran pengeluaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah harus mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBN dan APBD. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang juga mewajibkan negara menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Ketentuan alokasi anggaran pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yang mengharuskan dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD.

b) Anggaran Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan di bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang berkelanjutan, dengan jumlah yang mencukupi, distribusi yang adil, serta pemanfaatan yang optimal. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, dalam Pasal 171 ayat 1, ditetapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tingkat provinsi serta kabupaten/kota, alokasi anggaran kesehatan ditetapkan paling sedikit 10% dari APBD, juga di luar gaji tenaga kesehatan.

c) Anggaran Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial, menurut International Labour Organization (ILO) , adalah kebijakan publik untuk mengurangi dampak negatif dari kejadian seperti kehilangan penghasilan akibat sakit, kecelakaan, atau pengangguran. Sementara itu, United Nations Children's Fund (UNICEF), memandangnya sebagai kombinasi kebijakan publik dan swasta untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi. Adapun menurut Asian Development Bank (ADB)menganggapnya sebagai kebijakan untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan. Anggaran perlindungan sosial dalam APBN terus meningkat, bahkan mencapai 12% dari total belanja pemerintah pusat tahun ini, untuk mendukung program-program seperti Dana Desa, PKH, Bantuan Pangan, dan Indonesia Pintar.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data *panel* yang terdiri dari data time series dan cross section, dengan jangka waktu 2015-2023 di 22 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 198.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

	Y	X1	X2	X3
Mean	6354.667	24423.50	16510.15	13.68414
Maximum	8062.000	43696.00	37165.00	90.51000
Minimum	5328.000	2633.000	2465.000	2.280000
Std. Dev.	443.0249	8194.591	6277.217	9.543213
Observations	198	198	198	198

Sumber: Data Diolah,2025

Analisis ini didasarkan pada data panel 9 tahun dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabaran hasil uji statistik deskriptif berdasarkan tabel

1. Pada Variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah observasi (N) sebanyak 198 data yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode penelitian. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai minimum sebesar 5328, nilai maksimum 8062, dengan nilai rata-rata 6354,667 dan standar deviasi 443,0249. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia antar daerah di Nusa Tenggara Timur cukup bervariasi, meskipun perbedaan antar wilayah masih relatif moderat.

2. Variabel Anggaran Pendidikan (X1)

Selanjutnya, variabel anggaran pendidikan memiliki nilai minimum sebesar 2.633 miliar dan maksimum 43.696 miliar, dengan rata-rata 24.423,50 miliar serta standar deviasi 8.194,591. Artinya, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam alokasi anggaran pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Variabel Anggaran Kesehatan (X2)

Variabel anggaran kesehatan memiliki nilai minimum 2.465 miliar, maksimum 37.165 miliar, rata-rata 16.510,15 miliar, dan standar deviasi 6.277,217, yang juga menunjukkan adanya variasi cukup tinggi dalam pengeluaran sektor kesehatan.

4. Variabel Anggaran Perlindungan Sosial (X3)

Variabel anggaran perlindungan sosial menunjukkan nilai minimum 2,28 miliar dan maksimum 90,51 miliar, dengan rata-rata 13,684 miliar serta standar deviasi 9,543. Nilai standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan adanya ketimpangan alokasi anggaran perlindungan sosial antar daerah di Nusa Tenggara Timur selama periode penelitian.

Regresi Data Panel

Pemilihan model terbaik dalam analisis data panel dilakukan melalui serangkaian tiga uji spesifikasi model yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Tabel 2: Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan Model Terbaik		
Uji	Nilai P	
Uji Chow	0.0000	FEM

Uji Hausman	0.2744	REM
Uji LM	0.0000	RE M

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, analisis regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan model *random effect* (REM) sebagai model terbaik. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai p 0.0000, yang mengindikasikan bahwa model *fixed effect* (FEM) lebih tepat dibandingkan model *pooled*. Namun, hasil Uji Hausman dengan nilai p 0.2744 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara model *fixed effect* dan *random effect*, sehingga model *random effect* lebih disarankan. Selain itu, Uji LM dengan nilai p 0.0000 juga mendukung pemilihan model *random effect* (REM) karena lebih tepat dibandingkan model *pooled*.

1) Regresi Data Panel Dengan *Random Effect Model*

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	5836.853	54.39025	107.3143	0.0000
X1	0.010225	0.002197	4.655187	0.0000
X2	0.019693	0.001750	11.25117	0.0000
X3	-4.169267	0.806360	-5.170477	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan uji Random Effect Model, diperoleh hasil persamaan regresi panel sebagai

$$\text{berikut: } Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 5836.85294631 + 0.0102253674535X_1 + 0.0196925686959X_2 - 4.16926665756X_3$$

Keterangan:

Y= Indeks Pembangunan Manusia (Poin)

X1= Anggaran Pendidikan (Rupiah)

X2= Anggaran Kesehatan (Rupiah)

X3= Anggaran Perlindungan Sosial (Rupiah)

α_0 = Konstanta/Koefisien

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, = Koefisien regresi variabel

e= Variabel Pengganggu

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa:

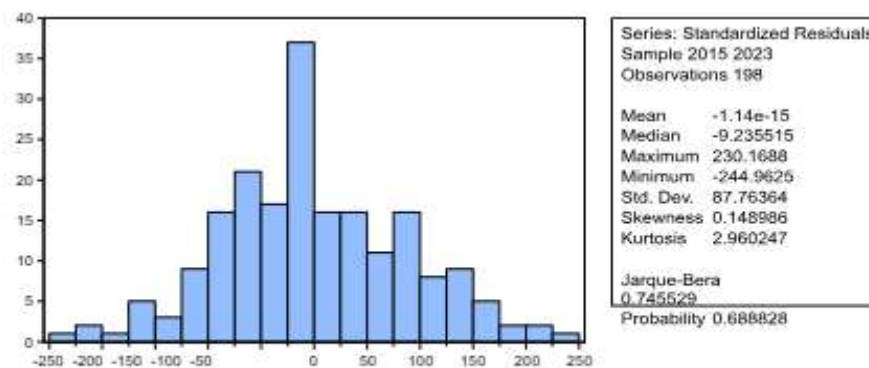
Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia dengan koefisien 0.012253674535 dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini diartikan bahwa jika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat sebesar 1 miliar maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0.0102 poin, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan koefisien 0.0196925686959 dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini diartikan bahwa jika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkat sebanyak 1 miliar maka Indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar sebesar 0.0197 poin, ceteris paribus.

Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap Indeks pembangunan manusia dengan koefisien -4.16926665756 dengan nilai probabilitas $4.16 > 0,05$. Hal ini diartikan bahwa setiap peningkatan anggaran perlindungan sosial sebesar 1 miliar rupiah justru menurunkan Indeks pembangunan manusia sebesar 4.1693 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini bisa mengindikasikan bahwa dana perlindungan sosial belum tersalurkan secara efektif atau belum tepat sasaran, sehingga belum mampu mendorong peningkatan Indeks pembangunan manusia secara langsung.

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2025

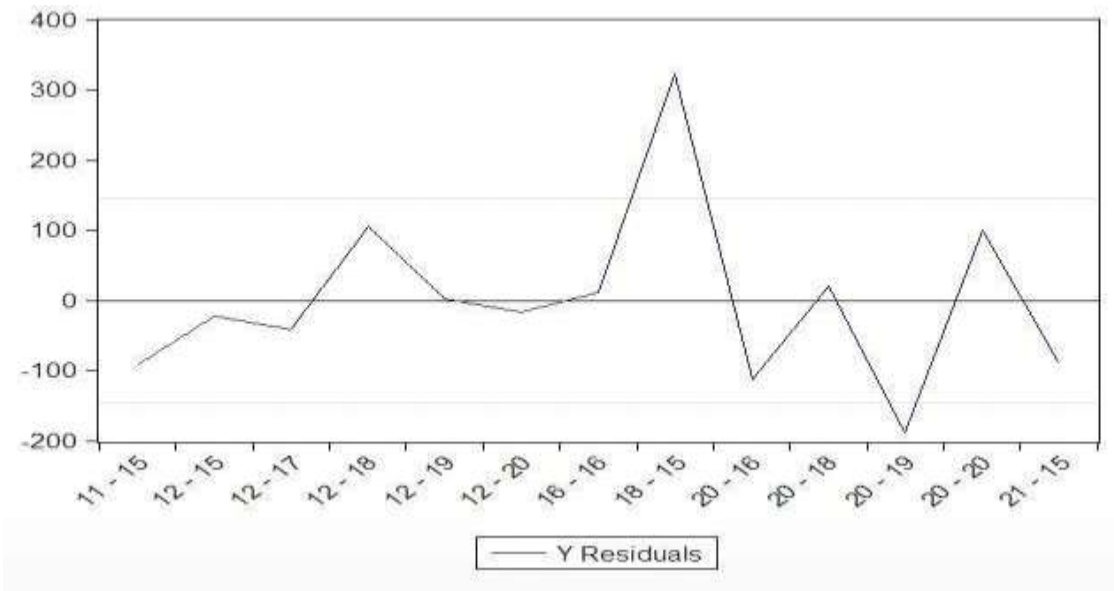
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar $0.688828 > \text{nilai signifikan } (0.05)$. Hal ini menandakan bahwa residual yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas**Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.628626	0.178298
X2	0.628626	1.000000	-0.001299
X3	0.178298	-0.001299	1.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 diketahui koefisien korelasi y_1 dan x_1 sebesar $0.620626 < 0,85$, x_1 dan x_3 sebesar $0.178298 < 0.85$ dan x_2 dan x_3 sebesar $-0.001299 < 0.85$, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

c) Uji Heterokedastisitas

Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat bahwa tidak melewati batas (500 dan - 500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis**1) Uji Signifikansi Regresi Secara Simultan (Uji F)****Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)**

R-squared	0.965125	Mean dependent var	6354.667
Adjusted R-squared	0.960286	S.D. dependent var	443.0249
S.E. of regression	88.28713	Akaike info criterion	11.91662
Sum squared resid	1348469.	Schwarz criterion	12.33180
Log likelihood	-1154.745	Hannan-Quinn criter.	12.08467
F-statistic	199.4803	Durbin-Watson stat	1.028678
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2025

1. Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_1 Paling sedikit salah satu $\beta_i \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$) artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Taraf nyata $\alpha = 5\%$ dengan derajat bebas pembilang $(k-1)$ dan derajat bebas penyebut $(n - k)$ maka $F_{tabel} = F_{\alpha} (k - 1)(n - k)$.**3. Kriteria pengujian sebagai berikut:**

H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau p

$> 0,5$ H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

atau $p \leq 0,5$

4. Uji Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software evIEWS 9 yang disajikan pada tabel 4.7 diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 199.4803 dan memiliki nilai F_{tabel} sebesar 2.66.

5. Simpulan

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 199,4803 lebih besar dari

F_{tabel} sebesar 2,66 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa anggaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2015–2023. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,9603 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi perubahan IPM sebesar 96,03 persen, sedangkan sisanya 3,97 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

2) Uji Signifikansi Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y) atau pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun tahapan uji parsial sebagai berikut:

Tabel 6: Hasil Uji Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5836.853	54.39025	107.3143	0.0000
X1	0.010225	0.002197	4.655187	0.0000
X2	0.019693	0.001750	11.25117	0.0000
X3	-4.169267	0.806360	-5.170477	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

1. Pengaruh Anggaran Pendidikan (X1) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur

1) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

$H_1: \beta_1 < 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1) Taraf Nyata (α) = 5 persen atau tingkat keyakinan 95 persen.

2) Kriteria Pengujian

Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$. maka H_0 diterima. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. maka H_0 ditolak.

3) Menghitung nilai statistik

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software eviews 9 yang disajikan pada tabel 7 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.010225. di peroleh nilai $t_{hitung} 4.655 > 1.972 t_{tabel}$ dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0.05$.

4) Simpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai t-hitung (4,655) $>$ t-tabel (1,972) dengan p-value $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,010225 menandakan bahwa setiap peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan IPM sebesar 0,010225 poin, dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Pengaruh Anggaran Kesehatan (X1) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur

1) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2), secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

$H_0: \beta_1 < 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Tarif nyata (α) = 5 persen atau tingkat keyakinan 95 persen.

3) Kriteria Pengujian

Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$. maka H_0 diterima. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. maka H_0 ditolak.

4) Menghitung nilai Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software EViews 9 yang disajikan pada Tabel 4.7, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0,019693. Nilai t_{hitung} sebesar 11,251 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,972, serta nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

5) Kesimpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai t_{hitung} (11,251) > t_{tabel} (1,972) dengan p-value 0,000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,019693 berarti setiap peningkatan anggaran kesehatan sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan IPM sebesar 0,019693 poin, dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Pengaruh Anggaran Perlindungan Sosial (X3) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur

1) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial (X3), secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

$H_0: \beta_1 < 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Tarif nyata (α) = 5 persen atau tingkat keyakinan 95 persen.

3) Kriteria Pengujian

Apabila nilai signifikansi > 0,05 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$. maka H_0 diterima. Apabila nilai signifikansi < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. maka H_0 ditolak.

4) Menghitung nilai Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software EViews 9 yang disajikan pada Tabel 4.7, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial sebesar -4,169267. Nilai t_{hitung} sebesar

-5,170 lebih kecil dari t-tabel sebesar -1,972 (nilai absolut t-hitung lebih besar dari t-tabel), serta nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

5) Simpulan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai t-hitung (-5,170) dengan p-value $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Koefisien regresi sebesar -4,169267 menandakan bahwa peningkatan anggaran perlindungan sosial justru menurunkan IPM, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pada sektor ini belum tersalurkan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan dan Anggaran Perlindungan Sosial secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis data, Nilai F_{hitung} sebesar $199.4803 > 2.66 F_{tabel}$, nilai probabilitas 0.00000, 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015- 2023. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.960286. Ini artinya bahwa variabel pendapatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial (X_3) mempengaruhi indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014-2023 sebesar 96.0286 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,9714% persen dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam konteks

pembangunan daerah, IPM menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, tingkat kemiskinan relatif tinggi, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah, menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan IPM kabupaten/kota secara merata. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal daerah, khususnya melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pembangunan manusia di wilayah ini. Ketiga jenis anggaran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan secara simultan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Anggaran pendidikan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan dimensi pengetahuan IPM. Pendidikan bukan hanya berfungsi meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, tetapi juga menjadi instrumen fundamental dalam mendorong mobilitas sosial, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Di daerah seperti NTT, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan terpencil, peran anggaran pendidikan menjadi sangat menentukan. Investasi pemerintah daerah dalam pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi secara langsung meningkatkan kapabilitas manusia. Wijaya dan Suasih (2021) menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD secara kausal berkontribusi terhadap peningkatan capaian pendidikan dan penurunan tingkat kemiskinan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola dan konteks wilayah. Temuan ini relevan bagi NTT, di mana kualitas belanja lebih penting daripada sekadar besaran nominal anggaran.

Selain dimensi pendidikan, anggaran kesehatan memegang peranan sentral dalam meningkatkan aspek umur panjang dan hidup sehat. Kabupaten/kota di NTT masih menghadapi berbagai persoalan kesehatan seperti tingginya angka stunting, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata. Wiriana dan Sudibia (2022) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan berpengaruh

signifikan terhadap kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan antardaerah di Indonesia, yang secara tidak langsung memperbaiki indikator pembangunan manusia.

Anggaran perlindungan sosial melengkapi peran pendidikan dan kesehatan dengan fungsi stabilisasi dan redistribusi. Di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi seperti NTT, perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari guncangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Program bantuan sosial, jaminan kesehatan, subsidi pangan, serta pemberdayaan sosial berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kondisi minimum yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara optimal. Dalam perspektif pembangunan manusia, perlindungan sosial bukan sekadar kebijakan karitatif, tetapi investasi sosial yang mempercepat akumulasi modal manusia. Badawi et al. (2024) menekankan bahwa modal intelektual dan kapasitas manusia merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif, yang pada level makro tercermin dalam kualitas pembangunan manusia.

Pengaruh simultan anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap IPM menjadi semakin signifikan ketika dipahami melalui kerangka pembangunan struktural dan ekonomi regional. Andriansyah, Nurwanda, dan Rifai (2023) menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan regional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kebijakan publik yang mendukung transformasi ekonomi. Dalam konteks NTT, yang masih bergantung pada sektor primer dan menghadapi keterbatasan industrialisasi, peningkatan IPM melalui investasi sosial menjadi prasyarat utama bagi transformasi ekonomi jangka panjang. Anggaran pendidikan menciptakan tenaga kerja terampil, anggaran kesehatan memastikan keberlanjutan produktivitas, dan anggaran perlindungan sosial menjaga stabilitas sosial selama proses perubahan struktural berlangsung.

Hubungan antara kebijakan anggaran dan IPM juga tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro dan tata kelola keuangan daerah. Gupta (2021) menyoroti pentingnya liberalisasi keuangan dan efisiensi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks daerah, kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam

mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel menentukan seberapa besar dampak belanja publik terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang besar tanpa pengelolaan yang baik berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kegagalan kebijakan, sehingga tidak mampu meningkatkan IPM secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antarjenis anggaran harus disertai dengan penguatan institusi, perencanaan berbasis data, dan pengawasan yang efektif.

Selain aspek ekonomi dan fiskal, faktor sosial dan politik juga memengaruhi efektivitas anggaran pembangunan manusia. Fossati (2021) menunjukkan bahwa identitas nasional dan dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan. Di NTT, keberagaman budaya dan kondisi sosial lokal menuntut kebijakan anggaran yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan top-down yang tidak mempertimbangkan karakteristik lokal berpotensi mengurangi efektivitas belanja publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, pemerintah desa, dan aktor lokal lainnya menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial benar-benar menjawab persoalan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota.

Pengaruh simultan ketiga jenis anggaran tersebut terhadap IPM juga dapat dipahami melalui pendekatan interdependensi kebijakan. Anggaran pendidikan tanpa dukungan kesehatan yang memadai akan menghasilkan output yang suboptimal, begitu pula sebaliknya. Anak-anak yang sehat memiliki kapasitas belajar lebih baik, sementara pendidikan yang berkualitas meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat. Perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman yang memastikan bahwa kelompok miskin tidak terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi akibat keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dampak simultan dari ketiga anggaran tersebut bersifat sinergis dan multiplikatif, bukan sekadar aditif.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, pengaruh anggaran terhadap IPM kabupaten/kota di NTT juga dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal dan tingkat perkembangan ekonomi antardaerah. Kabupaten dengan PAD rendah cenderung lebih bergantung pada transfer pusat, sehingga fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran

menjadi terbatas. Alo dan Bawole (2025) dalam kajiannya mengenai pengembangan sektor primer di wilayah timur Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan regional dapat diminimalkan melalui kebijakan hilirisasi dan investasi sumber daya manusia. Temuan ini menguatkan argumen bahwa peningkatan IPM melalui belanja sosial merupakan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi daerah tertinggal seperti NTT.

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa kombinasi investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial memiliki korelasi positif dengan peningkatan IPM. Namun, besarnya pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta keberlanjutan pendanaan. Candradewi dan Rahyuda (2021) menegaskan bahwa indikator keuangan dan tata kelola yang baik berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja, baik di tingkat korporasi maupun pemerintahan. Dalam konteks pemerintah daerah, tata kelola anggaran yang baik memastikan bahwa belanja publik benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan manusia.

Dalam jangka panjang, peningkatan IPM melalui pengelolaan anggaran yang sinergis akan menciptakan efek umpan balik positif bagi pembangunan daerah. Masyarakat yang lebih terdidik, sehat, dan terlindungi secara sosial akan memiliki daya saing lebih tinggi, meningkatkan partisipasi ekonomi, serta memperkuat kohesi sosial. Hal ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur mengenai perubahan struktural dan pertumbuhan regional di Indonesia (Andriansyah et al., 2023). Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, strategi pembangunan manusia melalui optimalisasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi keharusan strategis untuk keluar dari perangkap ketertinggalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran perlindungan sosial secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiganya bekerja secara terpadu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Tantangan utama

bukan terletak pada besaran anggaran semata, melainkan pada efektivitas pengelolaan, kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal, serta sinergi antarsektor. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM di NTT membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, dukungan kebijakan nasional, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa belanja publik benar-benar berorientasi pada pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia

Teori modal manusia yang dipopulerkan oleh Gary Becker dalam bukunya *"Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education"* (1964), menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi dalam diri individu yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi belanja daerah diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bernilai (0.010225) dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) $< 0,05$ sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik ketika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat maka akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia di Kan/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palayukan (2019), Sari dan Tukiran (2022), serta Artha dan Yewiwati (2023), yang menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Goldani dan Momeni (2023) juga mendukung temuan ini, meskipun efektivitas belanja pendidikan bergantung pada jenjang dan pelaksanaan program. Selain itu, Al Mamun et al. (2025) menemukan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di India, Pakistan, dan Bangladesh.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks pembangunan manusia

Sadono (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas modal manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan di bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang berkelanjutan, dengan jumlah yang mencukupi, distribusi yang adil, serta pemanfaatan yang optimal. Menurut Mankiw (2006), pengembangan sumber daya manusia dapat dicapai melalui peningkatan kualitas modal manusia, yang meliputi aspek pendidikan dan kesehatan.

Pada hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan bernilai (0.019693) dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nursita et al. (2025), Maryozi et al. (2025), Artha dan Yewiwati (2023), serta Kartal (2025) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan anggaran kesehatan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan akses kesehatan, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana peningkatan anggaran kesehatan terbukti berperan penting dalam memperbaiki indikator pembangunan manusia. Hal ini menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki kontribusi besar dalam mempercepat pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial terhadap Indeks pembangunan manusia.

Menurut International Labour Organization (ILO), perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari kejadian-kejadian seperti kehilangan penghasilan akibat sakit, kecelakaan kerja, kehamilan, pengangguran, disabilitas, usia lanjut, maupun kematian. Sementara itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) melihat perlindungan sosial sebagai kombinasi kebijakan dari sektor publik dan swasta yang bertujuan untuk mencegah serta mengurangi tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan kemiskinan.

Pada hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial bernilai (-4.169267) dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ sehingga H_1 , diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawan dan Fikriah (2020), Anjasari (2022), Harsono et al., (2024) yang menunjukkan bahwa bahwa pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial/belanja sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas alokasi anggaran di sektor tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model regresi data panel, dapat disimpulkan sebagai berikut. Uji signifikansi secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran perlindungan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2023. Uji signifikansi secara parsial (uji t) menghasilkan temuan sebagai berikut; variabel anggaran pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, meskipun dampaknya masih tergolong rendah. Selanjutnya, variabel

anggaran kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan dampak yang juga masih rendah. Adapun variabel anggaran perlindungan sosial secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada sektor ini belum dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program yang didanai anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar meningkatkan kualitas layanan dan aksesnya, serta mengoptimalkan distribusi anggaran sektor perlindungan sosial. Penelitian ini juga disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi IPM di Nusa Tenggara Timur.

REFERENSI

- Ahmed Wudil, A., MD Saad, N., Lacheheb, Z., & Muhammad, R. (2024). Government Budgets and Social Development in Africa: Moderating Effect of Government Effectiveness. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(1), 88–100. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i1/20116>
- Al Mamun, T. G. M., Abdur, R. M., Hassan, M. S., Amin, M. B., & Oláh, J. (2025). *Public sector efficiency in delivering social services and its impact on human development: A comparative study of healthcare and education spending in India, Pakistan, and Bangladesh* [Preprint, Version 2]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.12178>
- Akbar, M., Hussain, A., Akbar, A., & Ullah, I. (2020). The Dynamic Association Between Healthcare Spending, CO2 Emissions, And Human Development Index In Oecd Countries: Evidence From Panel Var Model. *Environment, Development and Sustainability*, 23(7). <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01066-5>
- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 90–98. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19816>
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(3), 167–178. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Andriansyah, Nurwanda, A., & Rifai, B. (2023). Structural change and regional economic growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 91-117.
- Alo, A. G., & Bawole, R. (2025). Downstream of Leading Primary Sector Industries in Papua Island. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 18(02), 187-208.
- Badawi, A., Nugroho, L., Hidayah, N., & Ali, A. J. (2024). The Effect Of Intellectual Capital On Competitive Advantage And Company Performance As A Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 17(2), 337-361.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (n.d.). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/kota*. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYjMg==/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (n.d.). *Upah minimum kabupaten/kota (UMR) sebulan*. Badan Pusat Statistik.
- Becker, G. S. (2009). *A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago Pers.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Setelah TA 2006*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Ekonomi, F., Prihastuti, A. H., Stie, D., & Bunda, P. (2018). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v4i1.665>

- Goldani, M., & Momeni, F. (2023). The impact of government educational expenditure on Human Development Index. *Iranian Political Economy Studies*, 6(1), 79–105. <https://doi.org/10.22126/ipes.2022.7748.1465>
- Gunawan, & Gunawan, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Pulau Sumatra. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 125–142. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/download/2970/1348>
- Gupta, K. (2021). The importance of financial liberalisation for economic growth: The case of Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 175-201.
- Fahraini, A. R. ., Andiny, P. ., & Safuridar, S. (2024). Dampak Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2536– 2545. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4650>
- Fernando, R., & Dewi, A. (2017). Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, Dan LDR Terhadap ROA Pada Perusahaan Di Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*, 1(3).
- Fossati, D. (2021). National identity and public support for economic globalisation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 61-84.
- Harsono, I. ., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 802–810. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4048>
- Hestningsih, A. N., Mafruhah, I., & Seftarita, C. (2023). The Influence Of Economics Growth, Minimum Wages, Poverty And Capital Expenditures On The Hdi. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 8(2), 78–86. <https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/download/79838/45988>
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939–948.
- Kartal, N. (2025). Evaluation of OECD countries in terms of Human Development Index, mortality rates and health expenditures with cluster analysis. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 28(1), 65- 80. <https://doi.org/10.61859/hacettepesid.1581132>
- Mankiw, N. G. (2006). Macroeconomist as a scientist and engineer. *Journal of Economic Perspectives*, 20(5), 29–46. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-5-86-103>
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/122/96>

- Mustofa, M. A., & Satria, P. B. (2025). Improving Human Development in Asia: Do Government Expenditure and Good Governance Matter?. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 32(2), 158–176. Retrieved from <https://ejournal.brin.go.id/JEP/article/view/8259>
- Nursita, L., et al. (2025). *Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandung (2013–2022)*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(1). <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE>
- Olievska, M., & Romanov, A. (2021). Investments in Human Capital Development and Wages: Relationships and Problems in Lower-Middle-Income Countries. *Baltic Journal of Economic Studies*, 7(1), 77–83. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-77-83>
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Rahman, A., Nursini, Razak, A. R., Anwar, A. I., & Sudirman, A. (2022). Does Human Capital And Wage Improvements Affect The Quality Of Human Development In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 7819–7832. <http://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/download/8975/5849>
- Rajput, B., & Rajput, A. (2018). Health expenditure, human development and economic growth for BRICS countries: Testing for co-integration and causality. *International Journal of Applied Research*, 4(3), 527–535. Diperoleh dari <https://www.allresearchjournal.com/archives/?ArticleId=7669>
- Ricardo, D. (1817). *On The Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Sari, A. I. C., A'ini, Z. F., & Tukiran, M. (2022). *Pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia*. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 127–136.
- Sadono, S. (2000). *Makroekonomi Modern : PPerkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT . Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A., & Fikriah, F. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 212–221. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/17087>
- Singh, K., Cheemalapati, S., RamiReddy, S. R., Kurian, G., Muzumdar, P., & Muley, A. (2025). Determinants of Human Development Index (HDI): A regression analysis of economic and social indicators. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.00006>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Sebelas)*. Erlangga. Tumbuan,
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1),

270. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>

- Wiratmoko, A., & Purwanti, L. (2023). IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA BY FUNCTIONS. *The EUrASEANs: Journal on Global Socio-Economic Dynamics*, (6(43), 191-201. [https://doi.org/10.35678/2539-5645.6\(43\).2023.191-201](https://doi.org/10.35678/2539-5645.6(43).2023.191-201)
- Wiriana, I. G., & Sudibia, I. K. (2022). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 15(2), 270-291.
- Candradewi, M. R., & Rahyuda, H. (2021). The influence of financial indicators, corporate governance and macroeconomic variables on financial distress. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1), 145-172.
- Wijaya, P. Y., & Suasih, N. N. R. (2021). One Decade, 20 Percent Education Budget: How About Causality Between Education Success and Poverty. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1), 173-189.